

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.663212/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
- 3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
- 4. Kode>Nama Satker : (663212) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG
- Sebesar : Rp. 280.110.000 (DUA RATUS DELAPAN PULUH JUTA SERATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.05.BF.1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Jumlah Uang

Rp. 280.110.000
Rp. 280.110.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 280.110.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PALEMBANG (014) Rp. 280.110.000

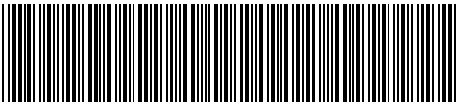
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663212/2026
I A. INFORMASI KINERJA



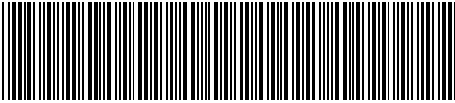
DS:1702-0864-0993-6817

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (663212) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

Halaman : I A. 1

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			280.110.000
Kegiatan	:	1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer			280.110.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu			
		2. 01	Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Militer			
		3. 01	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Militer			
		4. 01	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan Militer			
		5. 01	Jumlah perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Militer			
		6. 02	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu			
		7. 02	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan Militer			
		8. 03	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan Militer			
		9. 04	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan Militer			
		10. 05	Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan Militer			
		11. 06	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan Militer			
		12. 07	Jumlah pelaksanaan koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan Peradilan Militer			
		13. 08	Jumlah pelaksanaan koordinasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan Peradilan Militer			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1058.AEA	Koordinasi	2,00	kegiatan	20.560.000
Rincian Output	:	01	AEA.003 Pengawasan dan Pengamatan Lembaga Pemasyarakatan Militer	2.00	kegiatan	20.560.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1058.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	130,00	Perkara, Berkas Perkara	108.550.000
Rincian Output	:	01	BCA.U03 Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer diluar Wilayah Papua	120.00	Perkara	108.000.000
		02	BCA.U05 Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di	10.00	Perkara	550.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663212/2026
I A. INFORMASI KINERJA

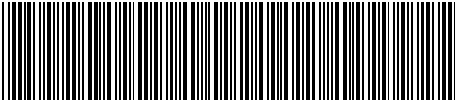


DS:1702-0864-0993-6817

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (663212) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

Perkara Hukum Perseorangan				Perkara, Berkas Perkara	
Lingkungan Peradilan Militer				10.00	Perkara
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1058.QCA Perkara Hukum Perseorangan	15.00	Perkara, Berkas Perkara
Rincian Output		:	01 QCA.001 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer (PN)	15.00	Perkara
					151.000.000
					151.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663212/2026
I B. SUMBER DANA



DS:1702-0864-0993-6817

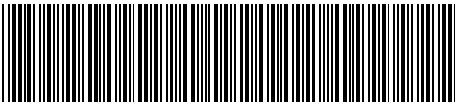
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (663212) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	280.110.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	280.110.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663212/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1702-0864-0993-6817

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (663212) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG
Kewenangan : (KD)

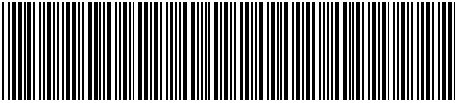
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
663212	PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG	-	280.110	-	-	-	280.110	11 . 51	
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	280.110	-	-	-	280.110		
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	-	280.110	-	-	-	280.110		
1058.AEA	Koordinasi (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	20.560	-	-	-	20.560		
01	RM	-	20.560	-	-	-	20.560		
1058.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	108.550	-	-	-	108.550		
01	RM	-	108.550	-	-	-	108.550		
1058.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	151.000	-	-	-	151.000	11 . 51	
01	RM	-	151.000	-	-	-	151.000	014	
JUMLAH		-	280.110	-	-	-	280.110		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663212/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:1702-0864-0993-6817

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (663212) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

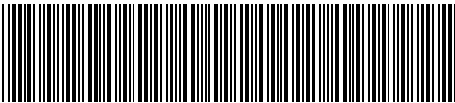
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	663212	PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	9.652	9.652	57.682	9.652	47.402	47.402	9.652	57.682	8.652	8.635	14.048	280.110
		BELANJA BARANG	0	9.652	9.652	57.682	9.652	47.402	47.402	9.652	57.682	8.652	8.635	14.048	280.110
		Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	0	9.652	9.652	57.682	9.652	47.402	47.402	9.652	57.682	8.652	8.635	14.048	280.110
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	9.652	9.652	57.682	9.652	47.402	47.402	9.652	57.682	8.652	8.635	14.048	280.110
													</		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663212/2026
IV A. B L O K I R



DS:1702-0864-0993-6817

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [663212] PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

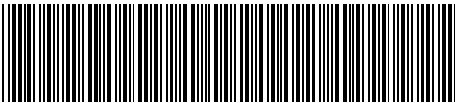
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663212/2026
IV B. C A T A T A N



DS:1702-0864-0993-6817

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [663212] PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775